

MENGUJI KAPASITAS POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA: STUDI KASUS PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2024

Raihani Dewi Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hanie.ra@gmail.com

Azriani Sari Nasution

STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi

sariazrianinasution@gmail.com

Abstrak

Pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024 memberikan kasus menarik untuk menganalisis hubungan antara kapasitas politik dan kualitas demokrasi dalam konteks regional yang beragam dan kompleks. Penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi kapasitas politik—ekstraktif, koersif, dan administratif—ke dalam kerangka komprehensif untuk mengevaluasi dampaknya terhadap tata kelola pemilu. Dengan meneliti partisipasi pemilih, efisiensi logistik, dan netralitas institusional, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan serta tantangan yang terus-menerus memengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi. Hasil penelitian mengungkapkan hambatan signifikan, termasuk rendahnya tingkat partisipasi pemilih, ketidakefisienan logistik, dan pelanggaran netralitas, yang melemahkan kredibilitas pemilu. Namun, kemajuan seperti implementasi sistem SILOG dan penguatan kolaborasi antar-lembaga menunjukkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan publik dan literasi digital dalam mendorong keterlibatan politik dan melawan disinformasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang ada dengan mengatasi kesenjangan dalam pemahaman mengenai peran saling terkait dari dimensi kapasitas politik dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan akuntabilitas, inklusivitas, dan transparansi pemilu, khususnya dalam konteks pemilihan regional. Wawasan yang diperoleh memiliki implikasi signifikan bagi pembuatan kebijakan di masa depan dan inisiatif pembangunan kapasitas yang bertujuan memperkuat tata kelola pemilu dan stabilitas demokrasi.

Kata Kunci: Kapasitas politik; kualitas demokrasi; tata kelola pemilu; partisipasi pemilih; transparansi.

Abstract

The 2024 North Sumatra gubernatorial election provided a compelling case for analyzing the interplay between political capacity and democratic quality in a diverse and complex regional setting. This study integrated three dimensions of political capacity—extractive, coercive, and administrative—into a comprehensive framework to evaluate their impact on electoral governance. By examining voter participation, logistical efficiency, and institutional neutrality, the research identified both strengths and persistent challenges affecting public trust and democratic legitimacy. The findings revealed significant obstacles, including low voter turnout, logistical inefficiencies, and neutrality violations, which undermined electoral credibility. However, advancements such as the implementation of the SILOG system and strengthened inter-agency collaboration highlighted opportunities to improve transparency and inclusivity. Furthermore, this study underscored the importance of public education and digital literacy in fostering political engagement and countering misinformation. This research contributed to the existing body of knowledge by addressing gaps in understanding the interconnected roles of political capacity dimensions in democratic processes. It offered practical recommendations for enhancing electoral accountability, inclusivity, and transparency, particularly in the context of regional elections. The insights gained held significant implications for future policy-making and capacity-building initiatives aimed at strengthening electoral governance and ensuring democratic stability.

Keywords: Political capacity; democratic quality; electoral governance; voter participation; transparency.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah di Indonesia, termasuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, merupakan momen penting untuk mengevaluasi kapasitas politik dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sebagai provinsi dengan kompleksitas etnis, geografis, dan politik yang tinggi, Sumatera Utara menyediakan konteks ideal untuk memahami dinamika politik lokal yang memengaruhi perkembangan demokrasi nasional. Dalam kajian ini, kapasitas politik, yang mencakup keterampilan administratif, kemampuan koersif, dan kapasitas ekstraktif, diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam mendukung efektivitas dan stabilitas demokrasi¹.

Indikator utama kualitas demokrasi, seperti partisipasi pemilih, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi sorotan dalam pemilu ini. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi pemilu berperan penting dalam

¹ Merete Bech Seeberg, "How State Capacity Helps Autocrats Win Elections," *British Journal of Political Science* 51, no. 2 (April 2021): 541–58, <https://doi.org/10.1017/S0007123419000450>; Andrea Vaccaro and Angelo Vito Panaro, "It's the State, Indeed! How State Capacity Facilitates Social Equality in Authoritarian Regimes," *Contemporary Politics*, March 6, 2024, 1–22, <https://doi.org/10.1080/13569775.2024.2310745>.

meningkatkan partisipasi publik², sementara kapasitas administratif yang solid mendukung stabilitas politik melalui penyelenggaraan pemilu yang efisien³ mendokumentasikan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat dalam meningkatkan antusiasme masyarakat melalui program sosialisasi, seperti edukasi pemilih pemula, penyuluhan kepada petani dan nelayan, serta penggunaan alat peraga. Namun, keterbatasan anggaran dan jumlah petugas menjadi kendala dalam memastikan keberhasilan sosialisasi di semua desa.

Selain itu, Hulu⁴ menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini mengedepankan kerja sama dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan partisipatif serta mendukung penegakan hukum selama pemilu. Sementara itu, Kirana et al.⁵ menegaskan pentingnya pemilu yang adil dan transparan sesuai asas “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil” (Luber Jurdil). Faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, akses informasi, dan peran media massa dalam menyediakan informasi objektif dinilai krusial untuk mendukung demokrasi yang berkualitas.

Namun, sejumlah tantangan juga diidentifikasi dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pilkada Kota Medan 2020, yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, menjadi contoh bagaimana tantangan kesehatan, partisipasi pemilih yang rendah (45,97%), dan efisiensi administrasi berdampak pada kualitas pemilu⁶. Penyelenggara pemilu harus mengintegrasikan perlindungan kesehatan, keadilan pemilu, dan efisiensi administratif untuk memastikan keberlanjutan demokrasi di masa darurat.

² Jamie Bologna Pavlik, “Access to Information Laws and Voter Behavior: Does Transparency Increase Participation?,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, January 21, 2020), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3448770>.

³ Alan Gelb and Anna Diofasi, “Biometric Elections in Poor Countries: Wasteful or a Worthwhile Investment?,” *Review of Policy Research* 36, no. 3 (2019): 318–40, <https://doi.org/10.1111/ropr.12329>; Wahyu Ziaulhaq et al., “Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Antusias Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Tahun 2024,” *Journal Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (May 8, 2022): 55–62, <https://doi.org/10.58939/j-las.v2i1.217>.

⁴ Fandi Ahmad Hulu, “Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 (Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara),” April 29, 2024, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10421>.

⁵ Devina Khozila Kirana, M. Osama Ergi Setiawan, and Shello Priza, “Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang LUBER JURDIL,” *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (June 30, 2024): 11–26, <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>.

⁶ Eddy Iriawan, Bengkel Ginting, and Warjio Warjio, “Kapasitas Politik Dan Kualitas Demokrasi Di Era Covid 19 Pada PILKADA Kota Medan Tahun 2020,” *PERSPEKTIF* 12, no. 2 (April 18, 2023): 509–25, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8883>.

Meskipun studi-studi sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek pemilu di Sumatera Utara, masih terdapat kesenjangan dalam memahami hubungan antara kapasitas politik dan kualitas demokrasi secara komprehensif. Banyak penelitian cenderung memisahkan analisis kapasitas politik ke dalam dimensi administratif, koersif, atau ekstraktif, tanpa mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka konseptual yang terpadu. Misalnya, Kirana et al.⁷ lebih berfokus pada asas Luber Jurdil tanpa membahas interaksi antara kapasitas koersif dan partisipasi pemilih. Ziaulhaq et al.⁸ menyoroti upaya sosialisasi, tetapi belum mengaitkan kapasitas administratif dengan efisiensi pengelolaan logistik pemilu secara menyeluruh.

Dalam konteks kapasitas koersif, penelitian Hulu⁹ berhasil mendokumentasikan peran pengawasan partisipatif, tetapi kurang mengelaborasi tantangan manipulasi digital atau tekanan ekonomi, yang sering menjadi bagian dari kapasitas koersif non-kekerasan¹⁰. Di sisi lain, meskipun teknologi seperti aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) diakui mampu meningkatkan transparansi logistik pemilu¹¹, kekhawatiran tentang privasi data dan potensi manipulasi digital tetap menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian lebih¹².

Untuk mengisi kesenjangan ini, penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik dengan mengintegrasikan tiga dimensi kapasitas politik—ekstraktif, koersif, dan administratif—ke dalam kerangka analisis yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan tidak hanya untuk menganalisis hubungan antara kapasitas politik dan kualitas demokrasi, tetapi juga untuk menawarkan rekomendasi praktis yang relevan guna memperkuat penyelenggaraan pemilu yang inklusif, transparan, dan kredibel di Sumatera Utara.

TELAAH PUSTAKA

⁷ Kirana, Setiawan, and Priza, “Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang LUBER JURDIL.”

⁸ Ziaulhaq et al., “Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Antusias Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Tahun 2024.”

⁹ hulu, “Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 (Studi Kasus Di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara).”

¹⁰ Peter Klimek, Ahmet Aykaç, and Stefan Thurner, “Forensic Analysis of the Turkey 2023 Presidential Election Reveals Extreme Vote Swings in Remote Areas,” *PLOS ONE* 18, no. 11 (November 15, 2023): e0293239, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293239>.

¹¹ analisamedan.com, “KPU Sumut Gelar Rakor Pengelolaan Logistik dan Penggunaan Aplikasi SILOG,” *Analisa Medan*, September 24, 2024, <https://www.analisamedan.com/berita-medan/kpu-sumut-gelar-rakor-pengelolaan-logistik-dan-penggunaan-aplikasi-silog/>; Jelajahnews.id, “KPU Sumut Rakor Pengelolaan Logistik dan Silog Pilgub 2024,” *Sumut Jelajahnews* (blog), September 14, 2024, <https://sumut.jelajahnews.id/kpu-sumut-rakor-pengelolaan-logistik-dan-silog-pilgub-2024/>.

¹² Sunwoo Park et al., “A Study on the Users’ Response to Privacy Issues in Customized Services,” *Journal of Multimedia Information System* 9, no. 3 (2022): 201–8, <https://doi.org/10.33851/JMIS.2022.9.3.201>.

Kapasitas Politik: Dimensi Ekstraktif, Koersif, dan Administratif dalam Konteks Pemilu

Kajian kapasitas politik mencakup tiga dimensi utama—ekstraktif, koersif, dan administratif—yang saling melengkapi dalam membangun dasar pemerintahan yang efektif dan efisien, khususnya dalam konteks pemilu. Ketiga dimensi ini tidak hanya menjadi alat pengelolaan pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks demokrasi, analisis atas kapasitas politik dapat memberikan wawasan untuk mengevaluasi keberhasilan pemilu dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat sistem demokrasi.

Dimensi ekstraktif, yang mengacu pada kemampuan negara dalam mengumpulkan sumber daya seperti perpajakan, merupakan fondasi penting dalam mendukung logistik pemilu. Vaccaro dan Panaro¹³ menegaskan bahwa kapasitas ekstraktif berperan dalam membiayai program pemerintah secara berkelanjutan, termasuk kebutuhan logistik pemilu seperti kampanye dan pengadaan sarana pemilu. Namun, rendahnya kapasitas ini dapat memicu ketidakpuasan politik.

Selain itu, kapasitas koersif menjadi dimensi penting untuk menjaga stabilitas selama proses pemilu, terutama melalui penggunaan kekuatan yang sah dan terukur. Mao menunjukkan bahwa Hubungan negara dan masyarakat memengaruhi kapasitas koersif serta mobilisasi dan kerja sama¹⁴. Penanganan krisis membutuhkan kepatuhan publik dan mobilisasi sosial. Negara dengan kendali kuat meningkatkan kepatuhan melalui kapasitas koersif, sedangkan hubungan yang baik dengan masyarakat memperkuat mobilisasi dan kerja sama dalam merespons krisis. Sebagai contoh, White dan Herzog¹⁵ menyoroiti bagaimana Rusia dan Turki memanfaatkan kapasitas koersif untuk mempertahankan kekuasaan negara. Dalam demokrasi, pendekatan koersif yang efektif harus bersifat preventif, seperti penguatan sistem peringatan dini dan mekanisme mediasi, sehingga potensi konflik dapat dikelola secara transparan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Sementara itu, kapasitas administratif memainkan peran kunci dalam memastikan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kapasitas

¹³ Vaccaro and Panaro, "It's the State, Indeed! How State Capacity Facilitates Social Equality in Authoritarian Regimes."

¹⁴ Yexin Mao, "Political Institutions, State Capacity, and Crisis Management: A Comparison of China and South Korea," *International Political Science Review* 42, no. 3 (June 1, 2021): 316–32, <https://doi.org/10.1177/0192512121994026>.

¹⁵ David White and Marc Herzog, "Examining State Capacity in the Context of Electoral Authoritarianism, Regime Formation and Consolidation in Russia and Turkey," *Southeast European and Black Sea Studies* 16, no. 4 (October 2016): 551–69, <https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1242891>.

administratif adalah kemampuan pemerintah nasional dan regional untuk merancang program, mengelola dana, dan mempertanggungjawabkan hasil sesuai aturan dan tujuan¹⁶. Kemampuan lembaga birokrasi dalam mengelola logistik dan administrasi dengan akurat sangat penting untuk mendukung keberhasilan pemilu. Penguatan kapasitas administratif melalui inovasi teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi data pemilih, distribusi logistik, dan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil sering menghambat optimalisasi kapasitas ini. Oleh karena itu, investasi strategis dalam pengembangan infrastruktur serta pelatihan tenaga kerja birokrasi menjadi langkah esensial untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan akuntabel.

Dengan memadukan ketiga dimensi kapasitas politik, yaitu ekstraktif, koersif, dan administratif, negara dapat memperkuat landasan demokrasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Analisis mendalam atas kapasitas ini menawarkan panduan strategis dalam membangun sistem politik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Indikator Kualitas Demokrasi

Partisipasi masyarakat dalam proses politik merupakan indikator penting legitimasi dan inklusivitas demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan keterlibatan warga yang aktif dalam pemilu serta pengambilan keputusan. Namun, rendahnya akses informasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diidentifikasi oleh Susniwati et al.¹⁷. Transparansi memainkan peran kunci dalam mengatasi kendala ini, dengan Pavlik¹⁸ yang memperlihatkan bahwa penerapan undang-undang akses informasi publik di Brasil mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang berfokus pada peningkatan literasi politik dan akses informasi sangat penting untuk mendorong keterlibatan yang lebih luas.

Selain partisipasi, transparansi menjadi elemen fundamental dalam menciptakan keterbukaan dalam proses pemerintahan dan pemilu. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah. Misalnya, inisiatif keterbukaan fiskal melalui Open Government Partnership yang disoroti oleh Romero¹⁹ menunjukkan potensi transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Di Uni Eropa,

¹⁶ John Bachtler et al., “Administrative Capacity and EU Cohesion Policy: Implementation Performance and Effectiveness,” *Regional Studies* 58, no. 4 (April 2, 2024): 685–89, <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2276887>.

¹⁷ M. Si Susniwati, Moh Zamili, and Neni Sriwahyuni, “Democracy, Transparency, and Participation through the Openness of Public Information in Pematang Regency, Indonesia,” *Public Administration and Regional Development*, no. 12 (May 24, 2021): 493–511, <https://doi.org/10.34132/pard2021.12.09>.

¹⁸ Pavlik, “Access to Information Laws and Voter Behavior.”

¹⁹ Roberto Cruz Romero, *Public Participation and Transparency: Does Open Governance Promote Inclusion and Accountability?*, 2024, <https://doi.org/10.31219/osf.io/rtmbf>.

transparansi kebijakan terbukti memperkuat partisipasi masyarakat dalam isu-isu sensitif²⁰. Dengan demikian, transparansi harus dirancang untuk mencakup seluruh elemen masyarakat tanpa mengorbankan efisiensi dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas melengkapi partisipasi dan transparansi sebagai komponen utama demokrasi yang efektif. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. King dan McKennie²¹ menekankan pentingnya audit sosial dalam memperkuat akuntabilitas, meskipun implementasinya kerap menghadapi tantangan di tingkat lokal. Peran aktif masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci keberhasilan tata kelola di negara-negara seperti Brasil dan Afrika Selatan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tavares dan Romão²². Oleh karena itu, hubungan yang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam membangun sistem demokrasi yang adil, transparan, dan responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari pemberitaan media massa nasional, seperti Detik.com, Liputan6, Kumparan, dan Antara News, serta data primer dari rilis resmi lembaga pemerintahan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian Daerah (Polda). Informasi yang dikumpulkan mencakup jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), distribusi logistik, tingkat partisipasi pemilih, laporan pelanggaran, serta langkah pengamanan selama pelaksanaan pemilu. Literatur ilmiah dari jurnal terindeks dan buku akademik terkait kapasitas negara dan penyelenggaraan pemilu digunakan untuk mengontekstualisasikan temuan dalam kerangka teori kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif.

Data yang diperoleh dari rilis lembaga pemerintah dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan tiga dimensi kapasitas politik yang menjadi fokus penelitian, yaitu kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif. Rilis resmi KPU digunakan untuk mengevaluasi distribusi logistik pemilu, sedangkan laporan Bawaslu menyediakan data tentang pelanggaran, seperti ketidaknetralan

²⁰ Jane Nielsen et al., "Integrating Public Participation, Transparency and Accountability Into Governance of Marketing Authorisation for Genome Editing Products," *Frontiers in Political Science* 3 (October 15, 2021), <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.747838>.

²¹ Huckleberry King and Nathaniel McKennie, "Assessing the Impact of Audit Quality on Accountability and Transparency among Financial Institutions in the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Journal of Finance and Accounting* 7, no. 2 (April 20, 2023): 11–21, <https://doi.org/10.53819/81018102t4130>.

²² Paulino Varela Tavares and Ana Lúcia Romão, "Accountability e a Importância do Controle Social na administração Pública: Uma Análise Qualitativa / Accountability and the Importance of Social Control in Public Administration: A Qualitative Analysis," *Brazilian Journal of Business* 3, no. 1 (January 20, 2021): 236–54, <https://doi.org/10.34140/bjbv3n1-014>.

aparatur sipil negara (ASN) dan tantangan transparansi. Sementara itu, data dari media massa melengkapi analisis dengan memberikan gambaran persepsi publik terhadap penyelenggaraan dan hasil pemilu. Metode analisis kualitatif diterapkan untuk memproses data ini secara sistematis dan membangun narasi yang terhubung dengan kerangka teoritis.

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Analisis penelitian mengevaluasi tiga aspek utama dalam konteks kapasitas negara. Pertama, kapasitas ekstraktif dievaluasi melalui kesiapan logistik pemilu, seperti distribusi bahan pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS). Kedua, kapasitas koersif dianalisis berdasarkan langkah pengamanan oleh kepolisian dan penanganan pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN dan aparat keamanan. Ketiga, kapasitas administratif dilihat dari efisiensi pengelolaan birokrasi pemilu, terutama dalam menghadapi kendala infrastruktur dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan lancar.

Tiga parameter utama menjadi fokus penelitian ini untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Efektivitas logistik pemilu dinilai dari kesiapan distribusi bahan pemilu ke ribuan TPS di berbagai wilayah. Keamanan dan ketertiban dilihat dari jumlah dan jenis insiden yang dilaporkan serta respons pengamanan dari aparat kepolisian. Selain itu, kepercayaan publik dianalisis melalui persepsi masyarakat yang tercermin dalam pemberitaan media dan laporan resmi Bawaslu mengenai kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap regulasi.

Data dari pemberitaan media massa, rilis lembaga pemerintah, dan literatur ilmiah digunakan secara terintegrasi untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pelaksanaan pemilu. Analisis literatur ilmiah bertujuan untuk menempatkan temuan dalam konteks teoritis, sebagaimana dijelaskan oleh Mao²³ dan Seeberg²⁴, yang menguraikan pentingnya kapasitas negara dalam mendukung stabilitas demokrasi.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian memberikan wawasan menyeluruh tentang tantangan dan peluang dalam memperkuat demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan inklusif. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat tata kelola pemilu di tingkat lokal maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Ekstraktif Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 menghadirkan tantangan terkait kapasitas ekstraktif, khususnya dalam pengumpulan data pemilih dan

²³ Mao, "Political Institutions, State Capacity, and Crisis Management."

²⁴ Seeberg, "How State Capacity Helps Autocrats Win Elections."

pengelolaan logistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 10.771.496 pemilih melalui proses pemutakhiran yang mencakup validasi lebih dari 10,9 juta penduduk²⁵. Namun, masih terdapat permasalahan data ganda yang memerlukan kolaborasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Validasi ini menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa data pemilih akurat dan dapat dipercaya, mencerminkan pentingnya kapasitas administrasi dalam mendukung demokrasi yang berkualitas²⁶.

Pada aspek logistik, KPU mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk meningkatkan efisiensi manajemen distribusi pemilu, termasuk pengiriman logistik ke 25.223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Sumatera Utara²⁷. Teknologi ini diharapkan meminimalkan hambatan operasional, seperti keterlambatan distribusi, yang sering menjadi masalah di wilayah dengan topografi kompleks. Meskipun SILOG menawarkan potensi besar, penerapannya membutuhkan pelatihan intensif bagi petugas lapangan untuk memastikan pemanfaatan yang optimal²⁸. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas manusia dalam mendukung inovasi teknologi di bidang pemilu.

Secara teoretis, kapasitas ekstraktif yang memadai memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas dan legitimasi proses pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh Seeberg²⁹, kemampuan negara untuk mengumpulkan dan mengelola data pemilih secara akurat menjadi indikator kekuatan kapasitas ekstraktifnya. Dalam konteks Sumatera Utara, upaya pemutakhiran data yang melibatkan lebih dari 41.000 petugas lapangan mencerminkan pentingnya pendekatan sistematis untuk meningkatkan integritas data pemilu³⁰. Hal ini

²⁵ antaranews.com, "KPU tetapkan DPT Pilkada 2024 Sumut sebanyak 10.771.496 pemilih," Antara News, September 25, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4356115/kpu-tetapkan-dpt-pilkada-2024-sumut-sebanyak-10771496-pemilih>.

²⁶ vivamedan.co.id, "Coklit Pilkada 2024, KPU Sumut Temukan Data Ganda Deliserdang 8 Ribu Dan Medan 2 Ribu," 2024, <https://medan.viva.co.id/sumut/6511-coklit-pilkada-2024-kpu-sumut-temukan-data-ganda-deliserdang-8-ribu-dan-medan-2-ribu>.

²⁷ analisamedan.com, "KPU Sumut Gelar Rakor Pengelolaan Logistik dan Penggunaan Aplikasi SILOG."

²⁸ Jelajahnews.id, "KPU Sumut Rakor Pengelolaan Logistik dan Silog Pilgub 2024."

²⁹ Seeberg, "How State Capacity Helps Autocrats Win Elections."

³⁰ cnnindonesia.com, "KPU Tetapkan DPT Pilgub Sumatera Utara 2024 Capai 10,7 Juta Pemilih," nasional, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240924201745-617-1147915/kpu-tetapkan-dpt-pilgub-sumatera-utara-2024-capai-107-juta-pemilih>; <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1731846-pemutakhiran-data-pemilih-untuk-pilkada-sumatera-utara-sudah-79-persen>.

relevan dengan temuan Harris yang menegaskan bahwa kapasitas administratif yang solid dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi³¹.

Di sisi logistik, efisiensi distribusi sangat bergantung pada perencanaan strategis dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi. Penelitian Clark menyoroti pentingnya alokasi sumber daya dan kapasitas administratif yang memadai untuk mengatasi hambatan distribusi logistik dalam pemilu³². Penerapan SILOG di Sumatera Utara merupakan langkah konkret yang mendukung rekomendasi Mahmood tentang penggunaan sistem terpusat untuk meningkatkan efisiensi operasional³³. Selain itu, teknologi ini memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam manajemen logistik, sejalan dengan rekomendasi Kropf et al. untuk meningkatkan akuntabilitas dalam proses pemilu³⁴.

Dalam konteks lokal, implementasi teknologi seperti SILOG menandai kemajuan penting dalam manajemen logistik pemilu di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi ini memerlukan pelatihan lanjutan bagi petugas pemilu untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Lebih jauh lagi, koordinasi erat antara KPU dan Disdukcapil menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan data ganda yang berpotensi mengurangi akurasi DPT. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Sumatera Utara.

Kapasitas Koersif Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024

Kapasitas koersif menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah mengerahkan 12.514 personel melalui Operasi Mantap Praja Toba 2024 guna menjamin kelancaran seluruh tahapan pemilu. Operasi ini mencakup simulasi pengamanan yang dirancang untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, serta menyesuaikan strategi pengamanan dengan dinamika politik dan distribusi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut³⁵. Kolaborasi erat antara Polda Sumut dan KPU

³¹ J. Andrew Harris, "Election Administration, Resource Allocation, and Turnout: Evidence From Kenya," *Comparative Political Studies* 54, no. 3–4 (March 2021): 623–51, <https://doi.org/10.1177/0010414020938083>.

³² Alistair Clark, "The Cost of Democracy: The Determinants of Spending on the Public Administration of Elections," *International Political Science Review* 40, no. 3 (June 1, 2019): 354–69, <https://doi.org/10.1177/0192512118824787>.

³³ Zaad Mahmood, "Governance and Electoral Integrity: Evidence from Subnational India," *Studies in Indian Politics* 8, no. 2 (December 1, 2020): 230–46, <https://doi.org/10.1177/2321023020963521>.

³⁴ Martha Kropf et al., "Making Every Vote Count: The Important Role of Managerial Capacity in Achieving Better Election Administration Outcomes," *Public Administration Review* 80, no. 5 (2020): 733–42, <https://doi.org/10.1111/puar.13216>.

³⁵ detik.com, "Kapolda Sumut Ubah Strategi Pengamanan di Pilgubsu," detiksumut, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7338933/kapolda-sumut-ubah-strategi-pengamanan-di-pilgubsu>.

melalui rapat koordinasi memastikan langkah-langkah pengamanan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

Netralitas aparat keamanan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. Ketidaknetralan Polri dan ASN dapat mengancam proses demokrasi dan berujung kepada tindakan pelanggaran hukum pidana³⁶. Langkah dan komitmen netralitas bertujuan menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilih, kandidat, dan penyelenggara pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung tanpa tekanan atau intimidasi.

Dari perspektif akademis, pengelolaan kapasitas koersif yang baik berkontribusi pada stabilitas selama pemilu. Seeberg³⁷ dan Mao³⁸ menunjukkan bahwa negara dengan kapasitas koersif yang kuat mampu mengelola tantangan keamanan tanpa bergantung pada kekerasan terbuka, melainkan melalui strategi penegakan hukum yang terencana. Pendekatan berbasis intelijen dan simulasi pengamanan di Sumatera Utara mencerminkan implementasi prinsip ini. Namun, risiko kekerasan tetap menjadi tantangan, terutama di tengah persaingan politik yang tinggi. Birch et al. mengingatkan bahwa persaingan semacam ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap konflik, menjadikan langkah-langkah preventif seperti simulasi pengamanan sangat penting untuk mencegah eskalasi kekerasan³⁹.

Penerapan teknologi juga menjadi sorotan dalam meningkatkan efektivitas kapasitas koersif. Riou et al.⁴⁰ menyatakan bahwa teknologi dapat mendukung pencegahan intimidasi dalam pemilu, asalkan diimbangi dengan pelatihan yang memadai bagi aparat keamanan. Di Sumatera Utara, perluasan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pemantauan real-time, dapat memberikan respons cepat terhadap potensi ancaman keamanan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketertiban, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Secara praktis, keberhasilan pengelolaan kapasitas koersif di Sumatera Utara menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pelatihan intensif bagi

³⁶ detik.com, "PDIP Sumut Ingatkan ASN-TN I/Polri Harus Netral di Pilkada: Bisa Dipidana," detiksumut, 2024, <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7646738/pdip-sumut-ingatkan-asn-tn-i-polri-harus-netral-di-pilkada-bisa-dipidana>; rmol.id, "Agus Fatoni Jangan Terlalu Mengumbar Soal Netralitas ASN," Rmol.id, 2024, <https://rmol.id/politik/read/2024/06/27/626077/agus-fatoni-jangan-terlalu-mengumbar-soal-netralitas-asn>; waspadaonline, "Bambang Widjojanto Soroti Soal Netralitas ASN, Politik Uang Dan Kriminalisasi Di Pilgubsu 2024," *Waspada Online* (blog), September 26, 2024, <https://waspada.co.id/bambang-widjojanto-soroti-soal-netralitas-asn-politik-uang-dan-kriminalisasi-di-pilgubsu-2024/>.

³⁷ Seeberg, "How State Capacity Helps Autocrats Win Elections."

³⁸ Mao, "Political Institutions, State Capacity, and Crisis Management."

³⁹ Sarah Birch, Ursula Daxecker, and Kristine Höglund, "Electoral Violence: An Introduction," *Journal of Peace Research* 57, no. 1 (January 2020): 3–14, <https://doi.org/10.1177/0022343319889657>.

⁴⁰ Stanislas Riou, Oksana Kulyk, and David Yeregui Marcos del Blanco, "A Formal Approach to Coercion Resistance and Its Application to E-Voting," *Mathematics* 10, no. 5 (January 2022): 781, <https://doi.org/10.3390/math10050781>.

aparat keamanan untuk mengoptimalkan strategi koersif menjadi prioritas, sejalan dengan pandangan Flores dan Nooruddin bahwa pengelolaan konflik yang strategis dapat meningkatkan legitimasi pemilu⁴¹. Selain itu, sinergi antara Polda Sumut dan KPU dalam menyusun strategi pengamanan memastikan bahwa langkah koersif dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terjaga. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat menjadi model dalam pelaksanaan pemilu yang aman dan transparan di Indonesia.

Kapasitas Administratif Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024

Kapasitas administratif merupakan elemen kunci dalam mendukung kelancaran dan integritas Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan logistik pemilu, termasuk distribusi bahan pemilu secara transparan dan akuntabel⁴². Pelatihan teknis untuk operator SILOG di tingkat kabupaten/kota juga telah dilaksanakan guna memastikan keseragaman pemahaman dan optimalisasi implementasi aplikasi⁴³.

Selain itu, KPU Sumut memperkuat koordinasi dengan Polda Sumut untuk menjamin keamanan lebih dari 25.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Polda Sumut menggunakan pendekatan berbasis analisis risiko untuk mengantisipasi potensi gangguan, sehingga mampu menjaga netralitas dan efektivitas pengamanan pemilu⁴⁴. Sinergi ini memastikan bahwa aspek administratif dan keamanan berjalan seiring dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang inklusif.

Secara teoretis, upaya KPU Sumut sejalan dengan literatur yang menyoroti pentingnya kapasitas administratif dalam pemilu. Clark menekankan bahwa alokasi sumber daya administratif yang memadai dapat meningkatkan integritas pemilu dan memastikan keberhasilannya⁴⁵. Implementasi SILOG, misalnya, mencerminkan efisiensi manajerial yang ditekankan oleh Kropf et al., di mana struktur administratif yang baik berkontribusi pada akuntabilitas dan efektivitas kebijakan⁴⁶. Hal ini penting dalam konteks Sumatera Utara yang memiliki tantangan geografis dan demografis yang beragam.

⁴¹ Thomas Edward Flores and Irfan Nooruddin, "Why Incumbents Perpetrate Election Violence during Civil War," *Conflict Management and Peace Science*, August 15, 2022, <https://doi.org/10.1177/07388942221120382>.

⁴² analisamedan.com, "KPU Sumut Gelar Rakor Pengelolaan Logistik dan Penggunaan Aplikasi SILOG."

⁴³ Jelajahnews.id, "KPU Sumut Rakor Pengelolaan Logistik dan Silog Pilgub 2024."

⁴⁴ detik.com, "Kapolda Sumut Ubah Strategi Pengamanan di Pilgubsu."

⁴⁵ Clark, "The Cost of Democracy."

⁴⁶ Kropf et al., "Making Every Vote Count."

Namun, tantangan disparitas kapasitas administratif antar daerah tetap ada, sebagaimana disoroti oleh Mohr et al.⁴⁷. Langkah proaktif berupa pelatihan teknis oleh KPU Sumut merupakan strategi penting untuk mengatasi kesenjangan ini. Selain itu, integrasi teknologi seperti SILOG juga sesuai dengan temuan Gelb dan Diofasi, yang menyebutkan bahwa teknologi modern dapat memperkuat validasi data pemilih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu⁴⁸.

Secara ilmiah, langkah-langkah KPU Sumut menunjukkan bagaimana kapasitas administratif yang kuat dapat mengurangi risiko kesalahan logistik dan meningkatkan akurasi data pemilu. Hal ini mendukung temuan Williamson et al. yang menyatakan bahwa struktur administrasi yang profesional dapat menjaga integritas dan transparansi pemilu meskipun berada di bawah tekanan sosial dan politik⁴⁹. Dari perspektif praktis, strategi KPU Sumut seperti penggunaan SILOG dan pelatihan operator menciptakan model manajemen logistik yang dapat direplikasi di tingkat nasional. Sinergi antara KPU dan Polda Sumut menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam menghadapi tantangan operasional yang kompleks. Dengan pendekatan yang sistematis, Pemilu 2024 di Sumatera Utara diharapkan menjadi contoh terbaik dalam pemanfaatan kapasitas administratif untuk mewujudkan pemilu yang transparan, inklusif, dan akuntabel.

Kualitas Demokrasi: Tingkat Partisipasi Pemilih

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mencatat penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilgub 2018. Pada 2018, tingkat partisipasi mencapai 64,48% dari total 9.050.958 Daftar Pemilih Tetap (DPT), sementara pada 2024 turun menjadi 52,5% dari DPT sebesar 10.771.496. Penurunan ini juga dibarengi dengan peningkatan angka golput dari 35,52% pada 2018 menjadi 47,5% pada 2024⁵⁰ Kota Medan, sebagai pusat urban utama,

⁴⁷ Zachary Mohr et al., "Evaluating the Recessionary Impact on Election Administration Budgeting and Spending," *American Politics Research*, June 18, 2020, <https://doi.org/10.1177/1532673X20935785>.

⁴⁸ Gelb and Diofasi, "Biometric Elections in Poor Countries."

⁴⁹ Ryan D. Williamson, Kathleen Hale, and Mitchell Brown, "Security and Integrity: Administrative Structure, Capacity, and American Elections," *Journal of Political Institutions and Political Economy* 1, no. 2 (June 10, 2020): 189–207, <https://doi.org/10.1561/113.00000008>.

⁵⁰ detik.com, "Partisipasi Pemilih Di Pilgub Sumut 2024 Menurun Dibanding 2018," 2024, <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7679323/partisipasi-pemilih-di-pilgub-sumut-2024-menurun-dibanding-2018>; rmol.id, "Partisipasi Pemilih Di Pilgub Sumut 55,27 Persen," Rmol.id, 2024, <https://rmol.id/nusantara/read/2024/12/09/647960/partisipasi-pemilih-di-pilgub-sumut-55-27-persen>; rri.co.id, "Angka Partisipasi PSU Di Pilgubsu Sumut Menurun," rri.co.id - Portal berita terpercaya, 2024, <https://www.rri.co.id/medan/pilkada-2024/1171385/angka-partisipasi-psu-di-pilgubsu-sumut-menurun>.

menunjukkan tren serupa dengan tingkat partisipasi hanya 48,3% pada 2024, turun dari 60,5% pada Pilgub sebelumnya⁵¹.

Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 sedikit menurun dari 81,97% pada 2019 menjadi 81,78%, namun Sumatera Utara mencatat angka golput yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada 2024, angka golput di provinsi ini mencapai 50,68%, meningkat drastis dari 38,22% pada 2018⁵². Fenomena ini mencerminkan tingginya angka golput dalam Pilkada 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kejenuhan pemilih akibat jadwal pemilu yang berdekatan, durasi kampanye yang singkat sehingga kandidat kurang dikenal, ketidakpercayaan terhadap kandidat yang dianggap tidak mewakili aspirasi, serta kendala teknis seperti lokasi TPS yang jauh dan pelaksanaan pada hari kerja. Selain itu, kampanye yang kurang efektif, kekecewaan terhadap proses demokrasi, dan praktik politik uang turut memperburuk partisipasi pemilih. Semua ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat⁵³.

Literatur ilmiah mendukung temuan ini, dengan menyebutkan bahwa angka golput sering terkait dengan rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, kurangnya pendidikan politik, dan ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia⁵⁴. Dalam konteks Sumatera Utara, kombinasi rendahnya keterlibatan pemilih muda dan ketidakpuasan terhadap platform kampanye kandidat memperkuat faktor-faktor ini. Ketidaktertarikan pemilih muda dan kelompok rentan menjadi tantangan khusus yang perlu ditangani melalui pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif.

Tingginya angka golput di Sumatera Utara memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi proses demokrasi. Rendahnya tingkat partisipasi mencerminkan keterlibatan warga yang minim dalam proses politik, yang dapat mengurangi representasi demokratis dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Seiring dengan itu, dinamika politik lokal yang diwarnai oleh ketidakpuasan publik menyoroti perlunya reformasi yang mendalam dalam meningkatkan daya tarik politik lokal terhadap pemilih.

Strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih menjadi prioritas penting bagi penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang lebih efektif dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran pemilih, terutama di

⁵¹ rmol.id, "Jauh Dari Target, Partisipasi Pemilih Hanya 34,8 Persen Di Pilkada Medan," Rmol.id, 2024, <https://rmol.id/nusantara/read/2024/12/08/647823/jauh-dari-target-partisipasi-pemilih-hanya-34-8-persen-di-pilkada-medan>.

⁵² rmol.id.

⁵³ kompas.id, "Mengapa Golput Di Pilkada 2024 Tinggi?," 2024, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-golput-di-pilkada-2024-tinggi>.

⁵⁴ Lawrence R. Jacobs and Judd Choate, "Democratic Capacity: Election Administration as Bulwark and Target," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, March 16, 2022, <https://doi.org/10.1177/00027162211061318>; Muhammad Saqlain, "Revolutionizing Political Education in Pakistan: An AI-Integrated Approach," December 29, 2023, <https://doi.org/10.56578/esm010301>.

kalangan generasi muda. Kampanye berbasis komunitas juga dapat menjadi sarana yang relevan untuk menjembatani kesenjangan informasi dan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Selain itu, penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi informasi pemilu, dapat membantu meningkatkan transparansi proses pemilu dan memberikan akses yang lebih luas kepada pemilih⁵⁵.

Dari perspektif ilmiah, temuan ini mendukung argumen bahwa legitimasi politik sangat bergantung pada tingkat partisipasi pemilih. Seperti yang diungkapkan oleh Williamson et al., partisipasi yang rendah dapat memperburuk persepsi publik terhadap integritas demokrasi⁵⁶. Oleh karena itu, reformasi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap institusi politik, pemberdayaan pemilih muda, serta memastikan kandidat yang kompeten dan relevan harus menjadi prioritas. Secara praktis, pelajaran dari Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang dapat diadopsi secara nasional. Pendekatan inovatif, seperti pemanfaatan teknologi dan pengembangan program pendidikan politik yang terintegrasi, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan demikian, proses demokrasi dapat menjadi lebih inklusif, representatif, dan berkelanjutan di masa depan.

Penggunaan Teknologi Digital dalam Kampanye dan Transparansi Penyelenggaraan

Teknologi digital memainkan peran sentral dalam kampanye politik dan transparansi penyelenggaraan Pilkada Sumatera Utara 2024. Para kandidat secara luas memanfaatkan platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda. Strategi ini mencerminkan tren global di mana kampanye digital menjadi alat efektif untuk meningkatkan keterlibatan politik⁵⁷. Namun, tantangan signifikan muncul dalam bentuk disinformasi yang dapat merusak legitimasi demokrasi. Paxton memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, penyebaran informasi palsu melalui media sosial dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap proses politik⁵⁸.

Dalam konteks transparansi pemilu, penerapan Sistem Informasi Logistik (SILOG) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menunjukkan

⁵⁵ Gelb and Diofasi, "Biometric Elections in Poor Countries"; Saqlain, "Revolutionizing Political Education in Pakistan."

⁵⁶ Williamson, Hale, and Brown, "Security and Integrity."

⁵⁷ Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 44–56, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.

⁵⁸ Fred Paxton, "Towards a Populist Local Democracy? The Consequences of Populist Radical Right Local Government Leadership in Western Europe," *Representation* 56, no. 3 (July 2, 2020): 411–30, <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1643771>.

bagaimana teknologi dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang akuntabel. SILOG dirancang untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik pemilu, memastikan pengelolaan yang transparan, dan mempermudah pengawasan⁵⁹. Dengan mengurangi risiko manipulasi dan meningkatkan akurasi pengelolaan logistik, SILOG berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Secara teoretis, penggunaan teknologi digital mencerminkan perkembangan demokrasi digital yang lebih inklusif. Seperti dicatat oleh Saqlain⁶⁰, teknologi memiliki potensi untuk memperluas partisipasi generasi muda dalam proses politik. Namun, risiko disinformasi tetap menjadi ancaman utama. Studi Park et al. tentang menyoroti bagaimana manipulasi data digital dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, menunjukkan perlunya regulasi yang ketat dalam mengelola konten digital selama kampanye⁶¹.

Dalam hal transparansi penyelenggaraan, penerapan SILOG menunjukkan keberhasilan teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas logistik pemilu. Gelb dan Diofasi mengemukakan bahwa teknologi seperti biometrik dan sistem logistik elektronik dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi peluang manipulasi data⁶². Namun, tantangan seperti ancaman terhadap keamanan data dan kurangnya pelatihan teknis bagi penyelenggara pemilu masih perlu diatasi, sebagaimana diperingatkan oleh Riou et al.⁶³.

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memberikan dampak positif signifikan dalam memperkuat partisipasi politik dan transparansi pemilu. Namun, dampak negatif seperti disinformasi dan ancaman keamanan data memerlukan langkah pengawasan yang lebih ketat. Regulasi yang jelas dan kuat, seperti yang disarankan oleh Paxton dan Park et al., diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi mendukung kualitas demokrasi tanpa merusak integritasnya⁶⁴.

Implikasi praktis dari kajian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya pemilih muda, menjadi langkah penting untuk membekali mereka dengan kemampuan membedakan informasi valid dari informasi palsu selama masa kampanye. Kedua, penguatan sistem teknologi perlu diutamakan dengan mendorong investasi dalam teknologi pemilu, seperti SILOG, yang harus disertai pengembangan infrastruktur

⁵⁹ Jelajahnews.id, "KPU Sumut Rakor Pengelolaan Logistik dan Silog Pilgub 2024."

⁶⁰ Saqlain, "Revolutionizing Political Education in Pakistan."

⁶¹ Park et al., "A Study on the Users' Response to Privacy Issues in Customized Services."

⁶² Gelb and Diofasi, "Biometric Elections in Poor Countries."

⁶³ Riou, Kulyk, and Marcos del Blanco, "A Formal Approach to Coercion Resistance and Its Application to E-Voting."

⁶⁴ Park et al., "A Study on the Users' Response to Privacy Issues in Customized Services"; Paxton, "Towards a Populist Local Democracy?"

keamanan siber yang kuat guna melindungi data pemilih dari ancaman manipulasi. Ketiga, regulasi media sosial memerlukan kebijakan yang lebih ketat untuk memantau konten selama masa kampanye, dengan tujuan membatasi penyebaran disinformasi dan meningkatkan kredibilitas proses pemilu.

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam kampanye dan penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi. Namun, teknologi harus dilengkapi dengan regulasi dan pengawasan yang memadai untuk mengatasi tantangan, seperti disinformasi dan risiko keamanan data. Strategi berbasis teknologi ini relevan tidak hanya untuk Sumatera Utara tetapi juga dapat menjadi model yang diadopsi di tingkat nasional untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Kepercayaan Masyarakat terhadap Hasil Pilgub Sumatera Utara 2024

Pelanggaran netralitas yang signifikan dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 menunjukkan tantangan besar dalam menjaga integritas penyelenggara dan pihak terkait. Di Nias Selatan, keterlibatan kepala desa menjadi perhatian utama dengan tercatatnya 34 kasus pelanggaran yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi⁶⁵. Fenomena ini memperlihatkan celah dalam mekanisme pengawasan, yang berisiko merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Langkah-langkah mitigasi yang diterapkan, seperti deklarasi netralitas dan pembentukan tim pengawas, merupakan langkah positif. Namun, pengalaman internasional menunjukkan perlunya sanksi yang tegas dan konsisten untuk menciptakan efek jera. Studi Pavlik di Brasil, misalnya, menunjukkan bahwa pengawasan ketat yang disertai sanksi efektif dapat secara signifikan mengurangi pelanggaran⁶⁶.

Ketidaknetralan ASN memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada Sumut 2024. Sebagaimana dicatat King dan McKennie, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu⁶⁷. Sebaliknya, jika ketidaknetralan aparat dibiarkan, hal ini dapat menciptakan persepsi negatif yang berujung pada delegitimasi hasil pemilu dan instabilitas politik.

Penguatan pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih tegas menjadi langkah prioritas untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Literasi politik di kalangan ASN juga harus ditingkatkan untuk memperkuat komitmen netralitas mereka dalam proses demokrasi. Kolaborasi antara pemerintah,

⁶⁵ viva.co.id, "Bawaslu Sumut Catat 34 Pelanggaran Di Pilkada 2024, Terbanyak Di Nias Selatan," 2024, <https://medan.viva.co.id/sumut/7487-bawaslu-sumut-catat-34-pelanggaran-di-pilkada-2024-terbanyak-di-nias-selatan>.

⁶⁶ Pavlik, "Access to Information Laws and Voter Behavior."

⁶⁷ King and McKennie, "Assessing the Impact of Audit Quality on Accountability and Transparency among Financial Institutions in the United States."

masyarakat sipil, dan media merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel selama proses pemilu. Meskipun berbagai langkah mitigasi telah diambil, pelanggaran netralitas dalam Pilkada Sumut 2024 menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan pemilu. Penguatan regulasi, penerapan sanksi yang efektif, serta peningkatan literasi politik di kalangan ASN menjadi prioritas utama untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Hanya dengan menjaga integritas proses demokrasi, kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan terpilih dapat dipertahankan.

Faktor Pendukung pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mencatat beberapa faktor pendukung yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaannya. Salah satu faktor utama adalah peningkatan transparansi melalui inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti penerapan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG). Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan logistik yang lebih efisien dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu⁶⁸. Selain itu, kolaborasi erat antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kepolisian dalam pemantauan pemilu memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya literasi digital masyarakat. Sosialisasi yang gencar dilakukan oleh lembaga terkait telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses informasi seputar pemilu, seperti jadwal, daftar pemilih, dan lokasi tempat pemungutan suara⁶⁹. Kemajuan ini khususnya berdampak positif di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau, meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah-wilayah tersebut.

Penerapan teknologi dan kolaborasi lintas lembaga dalam Pilgub Sumatera Utara 2024 sejalan dengan temuan dalam literatur. Pavlik mencatat bahwa integrasi teknologi dalam proses pemilu dapat meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi publik dengan menyediakan akses informasi yang mudah diakses dan diaudit⁷⁰. Studi Maritza dan Taufiqurokhman menyoroti bahwa kemitraan antara lembaga negara dan masyarakat sipil memperkuat demokrasi dengan memastikan proses pengawasan yang lebih inklusif⁷¹.

Literasi digital masyarakat juga merupakan faktor kunci. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu secara

⁶⁸ analisamedan.com, "KPU Sumut Gelar Rakor Pengelolaan Logistik dan Penggunaan Aplikasi SILOG."

⁶⁹ Lubis, Gea, and Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024."

⁷⁰ Pavlik, "Access to Information Laws and Voter Behavior."

⁷¹ Dhiya Fahriyyah Maritza and Taufiqurokhman Taufiqurokhman, "Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif," *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI* 14, no. 1 (June 28, 2024): 71–84, <https://doi.org/10.33592/jia.v14i2.4679>.

signifikan meningkatkan partisipasi, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan platform digital. Dalam konteks Sumatera Utara, peningkatan literasi digital memberikan dampak positif terhadap inklusivitas dan aksesibilitas pemilu di berbagai wilayah⁷². Faktor pendukung seperti transparansi, kolaborasi lintas lembaga, dan literasi digital berkontribusi besar terhadap keberhasilan pelaksanaan Pilgub Sumatera Utara 2024. Secara ilmiah, temuan ini mendukung pandangan bahwa teknologi dan kolaborasi kelembagaan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dari perspektif praktis, keberhasilan penerapan SILOG dan pendekatan kolaboratif dapat menjadi model untuk pelaksanaan pemilu di wilayah lain. Penggunaan teknologi logistik yang terintegrasi dan pengawasan lintas lembaga harus diperluas untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih besar. Selain itu, kampanye literasi digital berbasis teknologi harus terus digencarkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu, khususnya di kalangan pemilih muda dan di daerah terpencil.

Dengan penguatan faktor-faktor pendukung ini, Pilgub Sumatera Utara 2024 memberikan contoh nyata tentang bagaimana teknologi, kolaborasi kelembagaan, dan literasi digital dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pemilu. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia dalam meningkatkan transparansi, inklusivitas, dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan langkah strategis yang konsisten, harapan untuk demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Sumatera Utara dapat terealisasi.

Faktor Penghambat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 menghadapi sejumlah kendala signifikan yang memengaruhi integritas pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu belum cukup untuk mengatasi tantangan ini, terutama di daerah-daerah dengan literasi politik yang rendah. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilu sebagai mekanisme demokrasi cenderung tidak terlibat dalam proses politik⁷³.

⁷² Nayla Meilany Putri, Widya Listiawati, and Ichsan Fauzi Rachman, "Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks SDGS 2030," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (May 19, 2024): 349–60, <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1208>; Ahmad Rohman, Masduki Asbari, and Dimas Rezza, "Literasi Digital: Revitalisasi Inovasi Teknologi," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 1 (2024): 6–9, <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.742>.

⁷³ Dimas Ramadhan, "Generasi Rasional-Demokratis: Proyeksi Partisipasi Memilih Kaum Muda," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (December 15, 2022): 144–58, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.213>.

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan edukasi politik yang lebih terarah dan inklusif diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik.

Tantangan lain adalah validasi data pemilih yang masih menghadapi kendala serius. KPU Sumatera Utara melaporkan adanya data pemilih ganda yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun upaya pemutakhiran data telah dilakukan. Permasalahan ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan data yang dapat memengaruhi keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pendekatan berbasis teknologi seperti e-voting atau blockchain berpotensi menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam manajemen data pemilih⁷⁴.

Netralitas aparat TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara pemilu juga menjadi isu penting yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Meskipun langkah seperti deklarasi netralitas ASN telah dilakukan, kasus pelanggaran masih dilaporkan, terutama di tingkat lokal. Di Nias Selatan, keterlibatan kepala desa dalam mendukung kandidat tertentu menjadi sorotan dengan tercatatnya 34 kasus pelanggaran. Fenomena ini mencerminkan celah dalam mekanisme pengawasan. Ketidaknetralan ini sering kali disebabkan oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu⁷⁵. Jika dibiarkan, masalah ini berpotensi merusak legitimasi pemilu dan memperkuat persepsi negatif terhadap proses demokrasi.

Politik uang juga menjadi hambatan serius yang merusak integritas pemilu. Praktik ini masih ditemukan di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan, di mana pengawasan lebih sulit dilakukan. Politik uang tidak hanya merusak nilai demokrasi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan perlu diperkuat untuk meminimalkan praktik semacam ini. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan efek jera⁷⁶.

Kendala lainnya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi kelompok pemilih disabilitas. Sebagian besar pemilih disabilitas melaporkan kurangnya fasilitas yang memadai di tempat pemungutan suara (TPS), seperti jalur aksesibilitas atau pendampingan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemilu belum sepenuhnya inklusif. Penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa kebutuhan

⁷⁴ Lubis, Gea, and Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024"; Riou, Kulyk, and Marcos del Blanco, "A Formal Approach to Coercion Resistance and Its Application to E-Voting."

⁷⁵ Mares and Visconti, "Voting for the Lesser Evil."

⁷⁶ Fadia Mufliha and Dejahave Al Jannah, "Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024), <https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3765>.

kelompok rentan seperti pemilih disabilitas terpenuhi untuk menciptakan proses pemilu yang lebih adil dan setara⁷⁷.

Validasi data pemilih merupakan tantangan umum dalam sistem pemilu berbasis data besar. Studi mencatat bahwa teknologi seperti e-voting dapat meningkatkan akurasi manajemen data, meskipun penerapannya memerlukan infrastruktur yang kuat dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu. Dalam konteks lokal, penggunaan teknologi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas DPT⁷⁸.

Netralitas aparat juga menjadi isu kritis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri sering disebabkan oleh tekanan politik atau kepentingan birokrasi. Dalam kasus Sumatera Utara, mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta penegakan regulasi yang konsisten diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Politik uang juga merupakan ancaman serius terhadap integritas pemilu. Koordinasi lintas lembaga, termasuk antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, harus diperkuat untuk memastikan bahwa praktik ini dapat diminimalkan. Selain itu, penyediaan fasilitas aksesibilitas untuk pemilih disabilitas menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara adil.

Implikasi praktis dari kajian ini mencakup berbagai aspek strategis yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Pertama, peningkatan literasi politik melalui sosialisasi berbasis komunitas yang fokus pada pendidikan politik perlu ditingkatkan, khususnya di daerah dengan tingkat partisipasi rendah. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan media lokal dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan edukasi politik. Kedua, penguatan teknologi validasi data melalui penggunaan teknologi digital seperti e-voting dan blockchain dapat meningkatkan akurasi data pemilih. Upaya ini harus disertai dengan investasi pada infrastruktur teknologi serta pelatihan teknis bagi penyelenggara pemilu.

Ketiga, pengawasan netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi prioritas utama. Penegakan regulasi yang konsisten terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta pembentukan tim pemantau independen, dapat membantu mengurangi pelanggaran netralitas di tingkat lokal. Keempat, peningkatan fasilitas untuk pemilih disabilitas sangat diperlukan dengan menyediakan infrastruktur ramah disabilitas di TPS, seperti jalur aksesibilitas dan

⁷⁷ *bisnis.com*, "Data Pemilih Sementara Pilkada 2024, Ada 30.881 Pemilih Disabilitas Di Sumut," 2024, <https://sumatra.bisnis.com/read/20240827/533/1794305/data-pemilih-sembentara-pilkada-2024-ada-30881-pemilih-disabilitas-di-sumut>.

⁷⁸ Fanila Kasmita Kusuma, "Pengaturan dan Tantangan Penggunaan E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Media Bina Ilmiah* 18, no. 6 (January 26, 2024): 1311–20, <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i6.674>.

pendampingan khusus. Selain itu, pelatihan bagi petugas TPS dapat meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan pemilih disabilitas. Kelima, penguatan pengawasan terhadap politik uang menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Bawaslu harus meningkatkan pengawasan di daerah rawan, terutama di wilayah pedesaan, dengan menegakkan hukum secara tegas dan memberikan sanksi yang konsisten untuk meminimalkan praktik politik uang.

Kendala dalam Pilgub Sumatera Utara 2024 mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam demokrasi di Indonesia, termasuk rendahnya partisipasi pemilih, politik uang, validasi data yang belum optimal, keterbatasan aksesibilitas, dan ketidaknetralan aparat. Dengan mengimplementasikan strategi berbasis teknologi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan tata kelola pemilu yang inklusif, kualitas demokrasi di Sumatera Utara dapat ditingkatkan. Langkah-langkah ini juga dapat menjadi model yang diterapkan di tingkat nasional untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di masa depan.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mengungkap wawasan penting mengenai hubungan antara kapasitas politik dan kualitas demokrasi dalam konteks regional yang kompleks. Analisis ini menekankan peran krusial kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif dalam memastikan efisiensi, keamanan, dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Temuan menunjukkan tantangan seperti rendahnya partisipasi pemilih, masalah logistik, dan pelanggaran netralitas yang berdampak pada kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi. Meskipun terdapat berbagai kendala, inovasi teknologi seperti SILOG dan peningkatan kolaborasi antar lembaga menunjukkan potensi untuk memperkuat tata kelola pemilu. Peningkatan pendidikan dan literasi politik masyarakat muncul sebagai strategi penting untuk mendorong inklusivitas dan mengatasi disinformasi.

Penelitian ini berkontribusi pada diskursus demokrasi dengan mengintegrasikan dimensi kapasitas politik ke dalam kerangka yang komprehensif, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemilu. Studi lanjutan dapat berfokus pada analisis longitudinal terhadap intervensi penguatan kapasitas dan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi, guna memastikan kemajuan berkelanjutan dalam tata kelola pemilu di berbagai konteks.

Referensi

analisamedan.com. (2024, September 24). *KPU Sumut Gelar Rakor Pengelolaan Logistik dan Penggunaan Aplikasi SILOG*. Analisa Medan. <https://www.analisamedan.com/berita-medan/kpu-sumut-gelar-rakor-pengelolaan-logistik-dan-penggunaan-aplikasi-silog/>

- antaranews.com. (2024, September 25). *KPU tetapkan DPT Pilkada 2024 Sumut sebanyak 10.771.496 pemilih.* Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4356115/kpu-tetapkan-dpt-pilkada-2024-sumut-sebanyak-10771496-pemilih>
- Bachtler, J., Polverari, L., Domorenok, E., & Graziano, P. (2024). Administrative Capacity and EU Cohesion Policy: Implementation Performance and Effectiveness. *Regional Studies*, 58(4), 685–689. <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2276887>
- Birch, S., Daxecker, U., & Höglund, K. (2020). Electoral Violence: an Introduction. *Journal of Peace Research*, 57(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/0022343319889657>
- bisnis.com. (2024). *Data Pemilih Sementara Pilkada 2024, Ada 30.881 Pemilih Disabilitas di Sumut.* <https://sumatra.bisnis.com/read/20240827/533/1794305/data-pemilih-sementara-pilkada-2024-ada-30881-pemilih-disabilitas-di-sumut>
- Clark, A. (2019). The Cost of Democracy: The Determinants of Spending on The Public Administration of Elections. *International Political Science Review*, 40(3), 354–369. <https://doi.org/10.1177/0192512118824787>
- cnnindonesia.com. (2024). *KPU Tetapkan DPT Pilgub Sumatera Utara 2024 Capai 10,7 Juta Pemilih.* nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240924201745-617-1147915/kpu-tetapkan-dpt-pilgub-sumatera-utara-2024-capai-107-juta-pemilih>
- Cruz Romero, R. (2024). *Public Participation and Transparency: Does Open Governance Promote Inclusion and Accountability?* <https://doi.org/10.31219/osf.io/rtmbf>
- detik.com. (2024a). *Kapolda Sumut Ubah Strategi Pengamanan di Pilgubsu.* detiksumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7338933/kapolda-sumut-ubah-strategi-pengamanan-di-pilgubsu>
- detik.com. (2024b). *Partisipasi Pemilih di Pilgub Sumut 2024 Menurun Dibanding 2018.* <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7679323/partisipasi-pemilih-di-pilgub-sumut-2024-menurun-dibanding-2018>
- detik.com. (2024c). *PDIP Sumut Ingatkan ASN-TN I/Polri Harus Netral di Pilkada: Bisa Dipidana.* detiksumut. <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7646738/pdip-sumut-ingatkan-asn-tn-i-polri-harus-netral-di-pilkada-bisa-dipidana>
- Flores, T. E., & Nooruddin, I. (2022). Why Incumbents Perpetrate Election Violence during Civil War. *Conflict Management and Peace Science*. <https://doi.org/10.1177/07388942221120382>

- Gelb, A., & Diofasi, A. (2019). Biometric Elections in Poor Countries: Wasteful or a Worthwhile Investment? *Review of Policy Research*, 36(3), 318–340. <https://doi.org/10.1111/ropr.12329>
- Harris, J. A. (2021). Election Administration, Resource Allocation, and Turnout: Evidence From Kenya. *Comparative Political Studies*, 54(3–4), 623–651. <https://doi.org/10.1177/0010414020938083>
- Hulu, F. A. (2024). *Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 (Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10421>
- Iriawan, E., Ginting, B., & Warjio, W. (2023). Kapasitas Politik dan Kualitas Demokrasi di Era Covid 19 pada PILKADA Kota Medan tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 12(2), 509–525. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8883>
- Jacobs, L. R., & Choate, J. (2022). Democratic Capacity: Election Administration as Bulwark and Target. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. <https://doi.org/10.1177/00027162211061318>
- Jelajahnews.id. (2024, September 14). KPU Sumut Rakor Pengelolaan Logistik dan Silog Pilgub 2024. *Sumut Jelajahnews*. <https://sumut.jelajahnews.id/kpu-sumut-rakor-pengelolaan-logistik-dan-silog-pilgub-2024/>
- King, H., & McKennie, N. (2023). Assessing the Impact of Audit Quality on Accountability and Transparency among Financial Institutions in the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Finance and Accounting*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.53819/81018102t4130>
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>
- Klimek, P., Aykaç, A., & Thurner, S. (2023). Forensic Analysis of the Turkey 2023 Presidential Election Reveals Extreme Vote Swings in Remote Areas. *PLOS ONE*, 18(11), e0293239. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293239>
- kompas.id. (2024). *Mengapa Golput di Pilkada 2024 Tinggi?* <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-golput-di-pilkada-2024-tinggi>
- Kropf, M., Pope, J. V., Shepherd, M. J., & Mohr, Z. (2020). Making Every Vote Count: The Important Role of Managerial Capacity in Achieving Better Election Administration Outcomes. *Public Administration Review*, 80(5), 733–742. <https://doi.org/10.1111/puar.13216>

- Kusuma, F. K. (2024). Pengaturan dan Tantangan Penggunaan E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 18(6), Article 6. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i6.674>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Mahmood, Z. (2020). Governance and Electoral Integrity: Evidence from Subnational India. *Studies in Indian Politics*, 8(2), 230–246. <https://doi.org/10.1177/2321023020963521>
- Mao, Y. (2021). Political Institutions, State Capacity, and Crisis Management: a Comparison of China and South Korea. *International Political Science Review*, 42(3), 316–332. <https://doi.org/10.1177/0192512121994026>
- Mares, I., & Visconti, G. (2020). Voting for The Lesser Evil: Evidence From a Conjoint Experiment in Romania. *Political Science Research and Methods*, 8(2), 315–328. <https://doi.org/10.1017/psrm.2019.12>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.33592/jia.v14i2.4679>
- Mohr, Z., Pope, J. V., Shepherd, M. J., Kropf, M., & Hill, A. (2020). Evaluating the Recessionary Impact on Election Administration Budgeting and Spending. *American Politics Research*. <https://doi.org/10.1177/1532673X20935785>
- Mufliha, F., & Jannah, D. A. (2024). Sinkronisasi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Politik Uang untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/3765>
- Nielsen, J., Eckstein, L., Nicol, D., & Stewart, C. (2021). Integrating Public Participation, Transparency and Accountability Into Governance of Marketing Authorisation for Genome Editing Products. *Frontiers in Political Science*, 3. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.747838>
- Park, S., Baek, J., Yoo, Y., & Kim, D. (2022). A Study on the Users' Response to Privacy Issues in Customized Services. *Journal of Multimedia Information System*, 9(3), 201–208. <https://doi.org/10.33851/JMIS.2022.9.3.201>
- Pavlik, J. B. (2020). *Access to Information Laws and Voter Behavior: Does Transparency Increase Participation?* (SSRN Scholarly Paper No. 3448770). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3448770>

- Paxton, F. (2020). Towards a Populist Local Democracy? The Consequences of Populist Radical Right Local Government Leadership in Western Europe. *Representation*, 56(3), 411–430. <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1643771>
- Putri, N. M., Listiawati, W., & Rachman, I. F. (2024). Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks SDGS 2030. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1208>
- Ramadhan, D. (2022). Generasi Rasional-Demokratis: Proyeksi Partisipasi Memilih Kaum Muda. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.213>
- Riou, S., Kulyk, O., & Marcos del Blanco, D. Y. (2022). A Formal Approach to Coercion Resistance and Its Application to E-Voting. *Mathematics*, 10(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/math10050781>
- rmol.id. (2024a). Agus Fatoni Jangan Terlalu Mengumbar Soal Netralitas ASN. Rmol.Id. <https://rmol.id/politik/read/2024/06/27/626077/agus-fatoni-jangan-terlalu-mengumbar-soal-netralitas-asn>
- rmol.id. (2024b). Jauh Dari Target, Partisipasi Pemilih Hanya 34,8 Persen di Pilkada Medan. Rmol.Id. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/12/08/647823/jauh-dari-target-partisipasi-pemilih-hanya-34-8-persen-di-pilkada-medan>
- rmol.id. (2024c). Partisipasi Pemilih di Pilgub Sumut 55,27 Persen. Rmol.Id. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/12/09/647960/partisipasi-pemilih-di-pilgub-sumut-55-27-persen>
- Rohman, A., Asbari, M., & Rezza, D. (2024). Literasi Digital: Revitalisasi Inovasi Teknologi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.742>
- rri.co.id. (2024). Angka Partisipasi PSU di Pilgubsu Sumut Menurun. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://www.rri.co.id/medan/pilkada-2024/1171385/angka-partisipasi-psu-di-pilgubsu-sumut-menurun>
- Saqlain, M. (2023). *Revolutionizing Political Education in Pakistan: An AI-Integrated Approach*. <https://doi.org/10.56578/esm010301>
- Seeberg, M. B. (2021). How State Capacity Helps Autocrats win Elections. *British Journal of Political Science*, 51(2), 541–558. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000450>
- Susniwati, M. S., Zamili, M., & Sriwahyuni, N. (2021). Democracy, Transparency, and Participation Through the Openness of Public Information in Pematang Regency, Indonesia. *Public Administration and Regional Development*, 12, Article 12. <https://doi.org/10.34132/pard2021.12.09>

- Tavares, P. V., & Romão, A. L. (2021). Accountability e a Importância do Controle Social na administração Pública: Uma Análise Qualitativa / Accountability and the Importance of Social Control in Public Administration: A Qualitative Analysis. *Brazilian Journal of Business*, 3(1), 236–254. <https://doi.org/10.34140/bjbv3n1-014>
- Vaccaro, A., & Panaro, A. V. (2024). It's The State, Indeed! How State Capacity Facilitates Social Equality in Authoritarian Regimes. *Contemporary Politics*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/13569775.2024.2310745>
- viva.co.id. (2024a). *Bawaslu Sumut Catat 34 Pelanggaran di Pilkada 2024, Terbanyak di Nias Selatan*. <https://medan.viva.co.id/sumut/7487-bawaslu-sumut-catat-34-pelanggaran-di-pilkada-2024-terbanyak-di-nias-selatan>
- viva.co.id. (2024b). *Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada Sumatera Utara Sudah 79 Persen*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1731846-pemutakhiran-data-pemilih-untuk-pilkada-sumatera-utara-sudah-79-persen>
- vivamedan.co.id. (2024). *Coklit Pilkada 2024, KPU Sumut Temukan Data Ganda Deliserdang 8 Ribu dan Medan 2 Ribu*. <https://medan.viva.co.id/sumut/6511-coklit-pilkada-2024-kpu-sumut-temukan-data-ganda-deliserdang-8-ribu-dan-medan-2-ribu>
- waspadaonline. (2024, September 26). Bambang Widjojanto Soroti Soal Netralitas ASN, Politik Uang dan Kriminalisasi di Pilgubsu 2024. *Waspada Online*. <https://waspada.co.id/bambang-widjojanto-soroti-soal-netralitas-asn-politik-uang-dan-kriminalisasi-di-pilgubsu-2024/>
- White, D., & Herzog, M. (2016). Examining State Capacity in the Context of Electoral Authoritarianism, Regime Formation and Consolidation in Russia and Turkey. *Southeast European and Black Sea Studies*, 16(4), 551–569. <https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1242891>
- Williamson, R. D., Hale, K., & Brown, M. (2020). Security and Integrity: Administrative Structure, Capacity, and American Elections. *Journal of Political Institutions and Political Economy*, 1(2), 189–207. <https://doi.org/10.1561/113.00000008>
- Ziaulhaq, W., Tanjung, Y. T., Tanjung, A. N. N., Amalia, D. R., & Idris, M. I. M. (2022). Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Antusias Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Langkat Tahun 2024. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58939/j-las.v2i1.217>